

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA DESA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN DONGGALA

**Riski Tirtaprima**

*Tirta.riski@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of Education and Training for Village Heads Policy at the Village Governance and Society Empowerment Board of Donggala Regency. The research type of this study is descriptive qualitative research. The informants in this study were 5 people. The determination of informants in this study was using purposive method. The type of data used in this study was primary and secondary data. The analysis of data used in this study was using Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The theory used in this study was the theory of Donald S. van Meter and Carl E. van Horn consisting of six aspects: Policy Standards and Targets, Resources, Interagency Communications, Characteristics of Implementing Agency (Bureaucracy Structure), Tendencies/Attitudes (Dispositions), and Social, Economic, and Political Conditions. In the implementation of this study, the researcher only focused on five aspects that were assumed to be in accordance with the phenomena that appeared at the time of this study: Policy Standards and Targets, Resources, Interagency Communications, Characteristics of Implementing Agency (Bureaucracy Structure), and Tendencies/Attitudes (Dispositions). Implementation of Education and Training for Village Heads Policy in general must to be improved continuously considering that the program goals was to improve the knowledge and skills of village heads in performing their duties and functions as the spearhead of national and regional development. Of course, in practice, the support of adequate resources is necessary, both human resources that have the ability to understand what their responsibilities in carrying out the process of policy implementation, and non-human resources such as facilities and infrastructures so that these elements can contribute maximally in the implementation process. In addition, to facilitate the implementation process, it should also has good and sustainable communication and cooperation the implementation process, where a good communication comes from a positive cooperation between government officials, in this regard the employees of the Village Governance and Society Empowerment Board of Donggala Regency. Thus, the researcher concludes that the implementation of Education and Training for Village Heads Policy had not run as expected.*

**Keywords:** *Policy Standards and Targets, Resources, Interagency Communication, Characteristics of Implementing Agencies (Bureaucracy Structure), Tendencies/attitudes (Dispositions)*

Dalam era otonomi yang terjadi saat ini masyarakat berharap banyak kepada pemerintah untuk membawa bangsa ini kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Alasannya karena pemerintah daerah merupakan bagian dari system pemerintahan yang mempunyai posisi untuk melayani dan menampung apirasi masyarakat di daerah.

Adanya otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Keadaan ini tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tapi juga dirasakan oleh pemerintah daerah baik itu pada tingkatan pemerintah provinsi ataupun pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan di sahkannya

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka otonomi desa memiliki ruang yang sedikit lebih luas dari sebelumnya hal ini dikarenakan desa sudah memiliki regulasinya sendiri untuk menata dan mengatur rumah tangganya sendiri dikarenakan undang-undang desa ini sudah dipisahkan dari undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Namun disisi lain pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota tidak boleh serta merta melepas tanggung jawab kepada desa karena pemerintah di tataran kabupaten dan kota menjadi pengawas dan pengarah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa.

Pemerintah kabupaten Donggala dalam hal ini berusaha untuk melaksanakan fungsi tersebut melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melaksanakan kebijakan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang ada di desa baik itu sumber daya secara materi Dana Desa dan Alokasi dana desa yang di tuangkan dalam APB-Desa maupun sumber daya yang menjadi potensi desa itu sendiri sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri. Hal ini dilakukan selain untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa apa tugas dan fungsinya juga untuk mencegah ketidak harmonisan antara Kepala Desa dengan perangkat Desa yang lain. Karena itu dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan proses pencairan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan Dana tersebut.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif, pendekatan kualitatif.. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kecil, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi seperti yang diungkapkan oleh Whitney dalam Nazir (2011:54) kemudian Nazir (2011:54) mengartikan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Arikunto (2010:188) “Informan adalah orang yang memberikan informasi”. Dalam hal ini selama penelitian penulis mendatangi informan dan melakukan komunikasi tatap muka. Informan yang diwawancara dapat dilihat lebih jelas sebagai berikut:

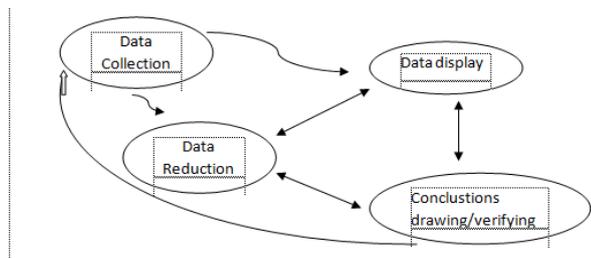
1. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa
3. Kepala Sub Bidang Badan Pemebrdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa pada Badan Pemebrdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5. staf teknis kegiatan Pendidikan dan pelatihan Kepala Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa: 1 Orang
6. Kepala Desa Pesik Kecamatan Sojol
7. Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model

interaktif (*interactive model of anlysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2012:246 sebagai berikut:

- 1) Penyusunan satuan atau editing data,
- 2) Kategorisasi atau pengelompokkan data,
- 3) Interpretasi/penafsiran makna data,
- 4) Penarikan kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.

Seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala sesuai dengan judul yaitu Implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Donggala.

Dalam rangkaian kegiatan penelitian ini, waktu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan serta mengolahnya hingga menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis, kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sejak penelitian dilaksanakan setelah terbitnya surat keputusan dari Pascasarjana Universitas Tadulako.

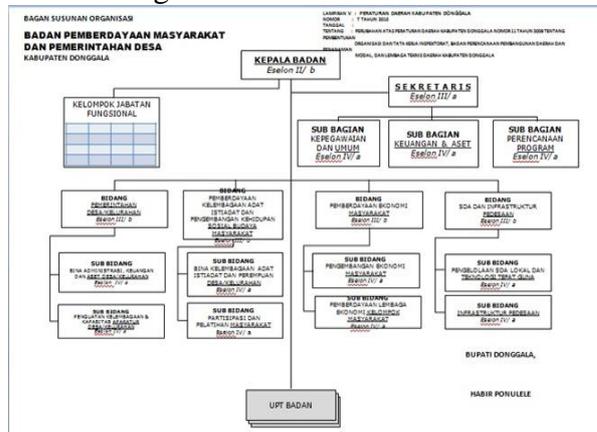
Sugiyono (2012:224-225) mengartikan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data”. Sesuai dengan pernyataan diatas, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Observasi,
- 2) Wawancara, dan
- 3) dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibentuk sejak tahun 2010 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala Serta tertuang dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 28 Tahun 2010 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPMPD. Adapun tugas pokok dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat, dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan infrasturktur perdesaan. Adapun struktur organisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa**

**B. Pembahasan**

**Implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala**

Kabupaten Donggala saat ini tengah berkembang dalam membangun daerah dengan terus memperbaiki infrastruktur guna untuk meningkatkan daya sayainganya dengan daerah-daerah berkembang lainnya. Pemerintah selalu berusaha melakukan pemantapan program guna memperbaiki dan mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Donggala. Sejalan dengan itu pemerintah Kabupaten Donggala melalui Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah berusaha untuk melakukan program yang diperlukan guna untuk mendukung program Revormasi Birokrasi di Indonesia salah satunya dengan melaksanakan Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Desa dimana program ini dimaksudkan untuk memeberikan pemahaman kepada Kepala Desa yang ada di wilayah Kabupaten Donggala agar mampu dalam melaksanakan dan mengawal penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Desa karena desa saat ini telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada desa untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan program ini berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 28 Tahun 2010 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai landasan hukumnya dengan salah satu tugasnya adalah pelaksanaan bimbingan, Pelatihan dibidang penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

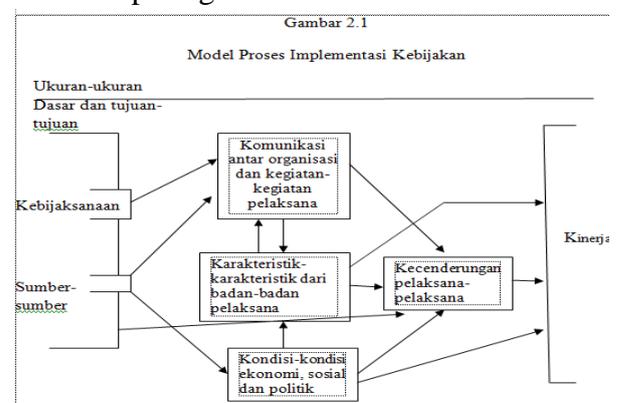
Proses implementasi Kebijakan baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik

telah ditetapkan, pemerintah dalam membuat suatu kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau tidak bagi sasaran kebijakan tersebut, dalam menjalankan perannya untuk menjalankan proses implementasi kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program-program pembagunan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini implementasi kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, penulis melakukan penelitian dengan mengadopsi teori Van Meter dan Van Horn yang dijadikan Sebagai pisau bedah dalam menganalisis dan dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam aspek, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan,
- 2) Sumber daya,
- 3) Komunikasi antar organisasi,
- 4) Karakteristik agen pelaksana,
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi,
- 6) Disposisi/sikap.

Seperti gambar dibawah ini :



**Gambar 3. Model Proses Implementasi Kebijakan**

Aspek-aspek tersebut di percaya membentuk hubungan antara kebijakan dengan *Performance* Kebijakan dan memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, hal ini dikarena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis. Sehingga dari aspek-aspek yang dikemukakan diatas akan dikaitkan dengan penelitian Penulis dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala.

Keenam aspek berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn yang digunakan penulis akan dikaitkan dengan penelitian penulis dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa pad Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa berdasarkan wawancara kepada 7 orang Informan diperoleh hasil wawancara yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1) Standar Dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan digunakan untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam menetapkan standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan dapat diukur, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan dari suatu kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (Implementors). Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementor bisa

saja menjadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan kepada beberapa reformer mengatakan bahwa teori yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa Kabupaten Donggala, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:160) tujuan-tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Jika dilihat dari teori yang ada diatas maka penulis melihat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala terletak pada aspek Standar atau ukuran-ukuran, hal ini dikarenakan belum adanya suatu standar yang baku dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Donggala, namun dari segi sasaran atau tujuannya suda sangat terarah karena didukung dengan adanya petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatuhan Kepala Desa Se-Kabupaten Donggala tahun 2014 dimana didalamnya termuat suatu konsep yang didalamnya memuat suatu tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Para Kepala Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada umumnya dan menjalankan konsep kepemimpinan yang demokratis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan keterampilan para Kepala Desa melaksanakan roda pemerintahan dengan baik dan benar pada khususnya.

### **2) Sumber Daya**

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material, dan metode. Implementasi

kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi dibidangnya sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya yang memiliki kehandalan implementasi akan berjalan lambat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya merupakan alat penggerak yang sangat efektif bagi kelangsungan implementasi kebijakan, apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan jika hanya dalam angan-angan dan rencana belaka pasti hasilnya nol, sehingga implementasi kebijakan tersebut pasti tidak dapat berjalan lancar.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:100) Implementasi Kebijakan Perlu dukungan Sumber daya manusia (*Human resources*) maupun Sumber daya Non Manusia (*human non- resources*). Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat disimpulkan bahwa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Donggala melalui bidang Pemerintahan Desa sebagai pengelola dan pelaksana yang menyangkut teknis pendidikan dan pelatihan Kepala Desa belum memiliki jumlah aparatur yang memadai dari segi kualitas kerja, demikian juga halnya dalam sumber daya lainnya seperti fasilitas gedung beserta dengan sarana dan prasarannya juga belum memadai karena belum memiliki gedung yang akan dijadikan untuk asrama bagi peserta diklat. Padahal syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resource*), namun dalam hal ketersediaan dari segi anggaran untuk pelaksanaan operasional pendidikan dan pelatihan kepala desa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah

terkait dengan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala desa.

### 3) Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi menunjukkan suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi mengandung pengertian yang begitu bermakna apabila dikorelasikan dengan organisasi, lembaga atau suatu dinas yang akan membuat suatu kebijakan, demikian halnya komunikasi juga sangat menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan dalam pendidikan dan pelatihan Kepala Desa Kabupaten Donggala.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat peneliti simpulkan konsistensi dari badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten donggala selaku panitia yang menyusun jadwal materi dalam melakukan kewenangannya sebagai implementor kebijakan Diklat Kepala Desa belum berjalan efektif karena ada hal-hal yang mengalami perubahan dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Sesuai dengan teori Edward III dalam Winarno (2005:127) terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hirarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

### 4) Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen/badan-badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi. Struktur Birokrasi

merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Van Meter dan Van horn dalam situmorang (2016:198) menyebutkan “struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan”.

Konsepsi tentang struktur birokrasi yaitu sejauh mana mekanisme atau tata aliran program yang mampu mendukung penerapan kebijakan, agar dapat tercapai program yang ditentukan dari atas melalui prosedur yang ada. Adapun indikator dari birokrasi yang peneliti gunakan ialah kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan. Dimana dalam hal ini pemerintah kabupaten donggala menjadi badan yang berwenang dalam penetapan suatu kebijakan terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala desa di kabupaten donggala dan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten donggala sebagai pelaksana kebijakannya.

Dalam penelitian ini sehubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program pendidikan dan pelatihan kepala desa dapat disimpulkan bahwa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai implementor kebijakan belum memiliki standar operasional prosedur yang baku yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standar baku terkait dengan poses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepala desa yang dibuat dan ditetapkan dengan keputusan. program pendidikan dan pelatihan kepala desa dilakukan dengan mengacu kepada peraturan Bupati Donggala yang menatur tentang tugas dan fungsi badan pemberdayaan masyarakat

dan pemerintahan desa dan disesuaikan kedalam bentuk petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala desa yang diterbitkan setiap tahun pelaksanaan program kebijakan.

### **5) Kondisi Sosial, Politik, Dan Ekonomi**

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implemntasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:144), mengatakan bahwa lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat mengakibatkan kinerja implementasi kebijakan menjadi gagal, karena upaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan suasana yang kondusif pada lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengungkapkan bahwa sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh DPRD terkait denga dukungan lingkungan politik sudah cukup memberikan dukungan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala desa. Dengan adanya dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diinginkan.

### **6) Disposisi/Sikap**

Disposisi/sikap adalah dukungan serta perilaku pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Disposisi juga bisa dikatakan watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kesadaran implementor dalam merespon kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Oleh karena itu hal ini mengarahkan sikap perilaku kebijakan untuk tetap berada pada sasaran dan tujuan kebijakan yang diimplementasikan. Kesadaran implementor itu sendiri tidak pernah lepas dari ketaatannya dalam melaksanakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga proses implementasi tidak berjalan dengan efektif, seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Situmorang (2016:202) para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa data dari penelitian, terkait dengan implementasi kebijakan program pendidikan dan pelatihan kepala desa pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten donggala maka penulis menyimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan program pendidikan dan pelatihan kepala desa berlangsung cukup baik, dilihat dari aspek disposisi dan komunikasi (kerja sama antar Aparat pelaksan), dimana komunikasi yang baik itu berasal dari suatu kerja sama yang positif antar aparat pemerintah dalam hal ini pegawai yang ada di lingkungan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten donggala. mengingat tujuan dilaksanakannya program tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak roda pembangunan daerah dan nasional, selain itu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala desa sudah

ditunjang oleh ketersediaan anggaran (sumber daya) dan mendapatkan respon yang baik dari lingkungan eksternal ekonomi, sosial dan politik.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis menyarankan kepada pemerintah daerah kabupaten Donggala melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa hal-hal sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan dukungan sumber daya yang mencukupi baik itu dari sumber daya manusi (*Human resources*) yang memiliki kemampuan dalam memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu proses implementasi kebijakan, maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*) seperti sarana dan prasarana agar unsur-unsur tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan proses implementasinya.
- Diperlukan adanya suatu standar yang baku dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan menghantarkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, khususnya kepada kedua orang tua penulis yang tidak pernah bosan memberikan motivasi dan kepada Dosen Pembimbing Dr. Irwan Waris M.Si dan Dr. Nurhannis, M.Si serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala yang telah memberi dukungan dan Pengertian kepada penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai seorang manusia yang tidak pernah mencapai kesempurnaan maka penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan

yang harus diperbaiki dalam artikel ini yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata II pada Universitas Tadulako. Untuk itu penulis tidak akan sungkan untuk menerima saran maupun kritik demi pembelajaran penulis di masa yang akan datang.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. *Konsep teori dan aplikasi sampel teknik analisa kebijakan pemerintah*. Bandung: Refika aditama.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rnika Cipta
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, H. Chazali. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* Depok: Social Security Development Institute.
- Subarsono AG. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan studi kasus*. Edisi Revisi Terbaru CAPS. Yogyakarta.